



Buletin Parlementaria

Nomor 1140/II/III/2021 • Maret 2021



Puskesmas Ujung Tombak Vaksinasi Covid-19



4 DPR Apresiasi
Presiden Batalkan Izin
Investasi Miras



23 DPR Terima
Penghargaan
Lingkungan
Ramah Disabilitas



9 772614 339005



BULETIN



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kabat, Banyuwangi, Jawa Timur. Foto: Eno/Man

Puskesmas Ujung Tombak Vaksinasi Covid-19

Tepat satu tahun setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020 lalu, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan puskesmas memegang peranan penting dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Kini, kasus Covid Indonesia mencapai 1,33 juta.

“Puskesmas menjadi ujung tombak pelaksanaan program vaksinasi Covid-19,” ujar Puan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Puskesmas Kabat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Selasa (2/3) pagi. Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, kecepatan program vaksinasi tergantung pada kesiapan puskesmas di seluruh Indonesia.

“Kita beruntung memiliki

infrastruktur puskesmas yang andal. Seperti di Puskesmas Kabat ini, kita lihat proses vaksinasi berlangsung lancar. Tenaga kesehatan dan infrastruktur puskesmasnya sangat siap,” terang Puan.

Puan melanjutkan, puskesmas adalah agen untuk menerapkan prinsip vaksinasi yang berkeadilan. Diketahui, prioritas daerah, situasi Covid-19 di daerah, kesiapan sarana dan prasarana penyimpanan vaksin dan penyelesaian target vaksinasi tahapan sebelumnya menjadi pertimbangan guna mencapai vaksinasi yang berkeadilan. “Lewat puskesmas, warga di desa-desa terjangkau vaksinasi sehingga prinsip vaksinasi berkeadilan terpenuhi,” ucap perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.

Kunjungan Puan ke Puskesmas Kabat merupakan rangkaian kunjungan kerjanya di Banyuwangi, Jatim. Selain melihat proses pelaksanaan vaksinasi, Puan juga berdialog dengan tenaga kesehatan Puskesmas Kabat. Salah satu yang dibahas adalah penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan puskesmas.

Banyuwangi telah menerima 34.140 dosis vaksin yang berarti setara dengan 17.070 sasaran. Hingga kini, telah divaksin 11.000 sasaran, dan akan dituntaskan dalam pekan ini untuk mencapai 17.070 sasaran. Adapun vaksinasi dijalankan dengan sasaran serta tahapan sesuai ketentuan pemerintah di semua puskesmas. ■ hal/sf

DPR Apresiasi Presiden Batalkan Izin Investasi Miras

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

“Saya patut memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut karena memang minuman keras lebih banyak membawa dampak negatif,” kata Azis dalam siaran pers yang diterima *Parlementaria*, Selasa (3/3).

Ia menyarankan ke depannya pemerintah harus lebih mengutamakan masukan dari para pakar dan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan. Azis juga meminta pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek, seperti kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi dan kesehatan.

“Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan, sehingga dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Politisi Partai Golkar itu menilai peran Forum Komunikasi Pimpinan

Wakil Ketua DPR RI
M. Azis Syamsuddin.
Foto: Runi/Man



Daerah (Forkopimda) sangat diharapkan demi mendukung dan mempermudah investasi di setiap daerah. Menurut legislator dapil Lampung II itu, langkah tersebut dapat dilakukan dengan membantu mempermudah izin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mencabut Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras. Presiden Jokowi menyebut keputusan itu diambil setelah mendengar berbagai masukan dari ulama, organisasi masyarakat (ormas), tokoh-tokoh agama dan masukan-masukan dari daerah. ■ *bla/sf*



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naual, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ertangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saurn, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Rahayu Setyawati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydus

FOTOGRAFER

Prima Danurirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD, Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Muhaimin Iskandar ajak Masyarakat Rapatkan Barisan Lawan Pandemi



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyerahkan bantuan secara simbolis ke Pondok Pesantren Moderat At-Thahiriyah Palamunan, Serang, Banten. Foto: Jaka/Man

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa tujuan dari diselenggarakannya Istigotsah bersama ulama se-Provinsi Banten adalah untuk memberikan kekuatan dan keyakinan lebih besar dari sebelumnya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Usai mengikuti istigotsah di Pondok Pesantren Moderat At-Thahiriyah Plamunan, Kramatwatu, Cilegon, Serang, Banten, Jumat (26/2), Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini meminta agar seluruh lapisan masyarakat untuk merapatkan barisan membentuk kekuatan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Merapatkan barisan, supaya semua menjadi kekuatan untuk menghadapi penanganan pandemi. Terutama

menjadi kekuatan untuk mendisiplinkan umat dan masyarakat supaya menaati protokol kesehatan, supaya menjaga diri, kesehatannya terjaga, olahraganya diperkuat, gizinya ditingkatkan,” kata politisi yang akrab disapa Gus AMI itu.

Di sisi lain, Gus AMI juga meminta agar pemerintah memprioritaskan para ulama, kiai, tenaga pengajar dan pendidik di lingkungan Pondok Pesantren untuk segera mendapatkan vaksin Covid-19. Mengingat, pemberian vaksin adalah hak seluruh warga negara.

“Ya kita berharap habis ini diprioritaskan para kiai, tokoh-tokoh pemimpin masyarakat, tokoh adat, kemudian pendidik, guru-guru, ustaz, pengajar pesantren. Yang paling penting segera percepat proses vaksinasi dan perbanyak penyalurannya supaya cepat dan merata sehingga perkembangan pandemi bisa menurun,” tuturnya.

Bersamaan dengan hal tersebut,

Gus AMI juga meresmikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Plus Tahfidz Quran 30 Juz di Ponpes Moderat At-Thahiriyah. Ia berharap sekolah tersebut tidak hanya membentuk generasi yang cerdas dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga kokoh dalam ilmu agama.

“Tentu bukan hanya lahir generasi yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi kuat dalam spirit dan ilmu agama nya, terutama menjadi kekuatan agama karena Islam di Indonesia adalah bukti kekuatan yang diakui dunia,” tuturnya.

Selain itu, Gus AMI yang didampingi Anggota DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal, Muhammad Rano Al-Fath serta Muhammad Khadafi juga memberikan bantuan 600 paket sembako bagi korban banjir di Kecamatan Priok, Tangerang. ■ ndy/es



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI meninjau fasilitas pemetaan BIG. Foto: Sofyan/Man

Kebijakan Satu Peta Perkuat Pemetaan Kerawanan Bencana

Pemetaan wilayah Indonesia yang terangkum secara integrated dalam Kebijakan Satu Peta atau *One Map Policy* dan *Single Line Administration* merupakan hal yang penting, sehingga menjadikan nilai tanah dapat sesuai dengan fungsinya dan mempunyai nilai ekonomi. Selain itu, dengan adanya *One Map Policy* yang dimotori oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), peta data kerawanan di seluruh wilayah Indonesia bisa dipetakan.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan hal tersebut saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Deputi Penguatan Inovasi

Kemenristek/ BRIN, Kepala BIG beserta jajaran, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bogor, di Kantor BIG, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (11/2).

“Struktur tanah kita (bisa dipetakan), maka kalau ada angin muson, dengan potensi hujan sekian, itu bisa di-*modelling*, dengan (teknologi) komputer yang bisa diprediksi dan diantisipasi (potensi bencananya). Maka muncul satu data, tinggal *klik*, bulan ini ada bencana dimana, keluar data. Jadi memang pemanfaatan teknologi secara terintegratif, itu harus dilakukan supaya kita dapat satu data yang akurat seakuratnya,” papar Sugeng.

Selain itu, politisi Partai NasDem tersebut menambahkan, dengan

adanya *Single Line Administration* dan pemetaan tanah yang akurat oleh BIG, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat memberikan status kepada tanah, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), maupun Hak Guna Bangunan (HGB). Kendati Kementerian ATR/BPN juga melakukan pengukuran tanah sebagai bentuk dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Karena tanah itu pada dasarnya seperti *puzzle*. Itulah betapa pentingnya (pemetaan yang akurat), sekaligus *climate change* yang terjadi dimana-mana ada bencana, maka data-data dari BIG merupakan bentuk mitigasi dari kemungkinan potensi bencana. Inilah yang menjadi penting,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. ■ sf

Pemerintah Harus Berpihak Pada Industri Baja Nasional

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap industri baja nasional. Mengingat saat ini pemerintah malah meningkatkan kuantitas impor baja dibanding melakukan ekspor. Padahal, Indonesia memiliki PT Krakatau Steel yang seharusnya dipacu produksinya dengan memberikan relaksasi dari sisi kebijakan sehingga mendorong optimalisasi produksi baja nasional.

Hal tersebut disampaikan Andi Yuliani usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke PT Krakatau Steel, di Serang, Banten, Kamis (11/2). Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut Dirut PT Krakatau Steel, jajaran Direksi PGN dan Dirjen Migas, serta perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Kita harus memberikan keberpihakan terhadap industri dalam

negeri termasuk Krakatau Steel yang menghasilkan baja yang banyak digunakan oleh industri-industri dalam negeri seperti industri manufaktur pesawat, kabel-kabel dan lainnya. Tetapi sayangnya kita masih impor, *nah* seharusnya kita tidak usah impor lagi. Pelan-pelan kita kurangi, mungkin tidak langsung mendadak kebijakannya, tapi kita impornya dikurangi,” harapnya.

Politisi F-PAN ini turut mengapresiasi Krakatau Steel yang telah berhasil melakukan restrukturisasi perusahaan. Kinerja perusahaan pun terbilang membaik, sehingga masih memiliki strategi untuk memperpanjang utangnya. Hal ini terbukti dengan keuntungan yang berhasil diperoleh pada kuartal pertama tahun 2020.

“Krakatau Steel melakukan defiasi di berbagai sektor, ada di semen, baja, energi dalam hal ini gas. Sehingga ini menjadi satu perputaran yang tidak sia-sia, ketika Krakatau Energi

mensuplai untuk pembuatan baja dia bisa mensuplai jauh lebih murah. Kalau misalnya untuk pembuatan baja harus membeli (sektor pendukung) dari luar negeri, tidak bisa menekan harga dan akan menjadi mahal,” ujar Andi.

Pertemuan tersebut juga membahas kondisi dan proyeksi pasokan gas untuk Krakatau Steel. Secara umum pasokan gas untuk perusahaan baja nasional yang diberikan oleh PGN dan Pertamina PHE berjalan lancar. Apalagi dengan harga gas yang diturunkan pemerintah menjadi seharga 6 dolar/MMBTU.

Untuk tahun 2020, penyaluran rata-rata gas dari PGN ke Krakatau Steel Grup sebanyak 17.4 BBTUD atau sekitar 82 persen dari kontrak minimal. Dengan komplemen dari Pertamina PHE, kebutuhan gas untuk Krakatau Steel ini relatif cukup terpenuhi. Ke depannya saat produksi gas dari Pertamina HE habis, maka komitmen pasokan gas akan dipenuhi dari PGN. ■ man/es



Foto bersama dan pertukaran cenderamata antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dengan direksi PT Krakatau Steel. Foto: Andri/Man

Eksplorasi Blok Migas Sijunjung Masih Terhambat Sejumlah Kendala



Anggota Komisi VII DPR RI
Tiffatul Sembiring.
Foto: Ali/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Tiffatul Sembiring menggambarkan sejumlah aspek yang menjadi kendala terhambatnya kegiatan eksplorasi Blok South West Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang dikelola PT Rizki Bukit Barisan (RBB). Sebab menurut rencana SKK Migas dengan PT RBB, produksi baru akan mulai berjalan pada tahun 2023 mendatang, sehingga meleset dari target sebelumnya pada tahun 2020 lalu.

“Jadi kalau kita ambil dari *visibility studies*, perlu dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari aspek teknisnya, SDM sudah oke dan sarpras sudah ada. Kemudian aspek ekonomi, juga harus dilihat *supply* dan *demand*-nya, hingga dampak bagi perekonomian daerah nantinya. Selanjutnya aspek legalitas, sejauh ini bupati selaku pemerintah daerah sudah mendukung dan semua sudah oke,” kata Tiffatul usai pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII

DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan mitra kerja terkait, di Sijunjung, Sumbar, Kamis (12/2).

Kendala berikutnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, terkait masalah sistem kerja sama antar instansi. Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai salah satu *potential buyer* harus dipastikan apakah betul-betul tertarik untuk menggunakan potensi gas bagi sumber pendukung kegiatan operasinya.

“Sementara kalau melihat kurva PLN, jika telah mencapai *peak load*, maka urutannya akan menggunakan PLTA, kemudian PLTU guna mengisi kebutuhan beban itu tadi. Selanjutnya barulah PLTD, kemudian yang paling terakhir digunakan yakni PLTG. PLTG paling terakhir dalam kurva, jawabannya karena gas itu mahal jika dioperasikan untuk listrik. Selama PLN masih punya PLTA dan PLTU, serta cadangan baru bara masih banyak, buat apa membeli gas? Tentu akan menjadi tidak ekonomis,” tegasnya.

Meski tidak dapat dipungkiri bahwa gas bumi merupakan salah satu *clean energy*, atau sebagai energi transisi dari *fossil energy* menuju energi baru terbarukan (EBT), namun Tiffatul menyangsikan PLN akan mampu menyerap pasokan gas secara penuh, terlebih jika melihat besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan.

“Kalaupun nantinya mereka (PLN, **red**) mendapat intervensi, tetap saja harus ekonomis. Ya, mungkin saja mereka beli tetapi tidak banyak. Mungkin dibeli sedikit lah. Tapi kalau secara hukum ekonomi tidak menguntungkan, *ngapain* keluar *duit* terus, nanti kinerjanya malah jadi *nggak* bagus. Makanya, kita harus ketemu dan harus *clear*, jangan kasih PHP terus. Setelah ini kita *follow up* terus. Sijunjung harus segera aktif, PT RBB jangan pasif menunggu saja, tetapi harus dikawal terus perkembangannya sampai dimana,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan eksplorasi migas di wilayah tersebut telah dimulai sejak tahun 1981 oleh PT Caltex dengan wilayah kerja Blok Singkarak. Per 2015 lalu, PT RBB mengambil alih kegiatan eksplorasi blok tersebut. Pada 2018, PT RBB telah melakukan eksplorasi pada Sumur Sinamar-1 dengan potensi gas yang dihasilkan mencapai 35 mmscf/d atau setara dengan 210 Mega Watt (MW) listrik. Jika sesuai target, Blok Migas Sijunjung akan mulai beroperasi pada 2023 mendatang. ■ atw/sf

Komisi IX Siap Jadi Relawan Uji Klinis Fase 2 Vaknus



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades memimpin Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI bertukar cenderamata dengan Dirut RS Kariadi beserta jajarannya. Foto: Arief/Man

Vaksin Nusantara (Vaknus) yang merupakan terobosan baru pembuatan vaksin di Indonesia akan diberikan kepada masyarakat umum setelah melakukan uji klinis fase 1 kepada lebih dari 30 relawan vaksin. Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI pun bertolak Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, Jawa Tengah, untuk mengecek perkembangan Vaknus pada tahap uji klinis fase 2.

“Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang percepatan produksi dan penggunaan Obat dan Alat Kesehatan Dalam Negeri, Komisi

”

HASIL DARI PENELITIAN VAKSIN NUSANTARA MAMPU MENGHASILKAN DAYA TAHAN TUBUH TERHADAP COVID. MESKI BEGITU BPOM PERLU SEGERA MENGECEK HASIL TEMUAN DARI UJIN KLINIS FASE 1 VAKSIN NUSANTARA

IX mendorong percepatan dalam pengembangan Vaksin Nusantara dan siap menjadi relawan uji klinis fase 2 Vaksin Nusantara,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades usai pertemuan dengan Dirut RS Kariadi beserta jajarannya di RS Kariadi, Semarang, Selasa (16/2).

Melki, sapaan akrabnya itu menjelaskan, berdasarkan keterangan dari tim peneliti, Vaknus aman untuk semua golongan, termasuk bagi warga yang memiliki komorbid (penyakit penyerta) dan anak-anak, karena tidak menimbulkan efek dan gejala apapun yang membahayakan. “Hasil dari penelitian Vaksin Nusantara mampu menghasilkan daya tahan tubuh terhadap Covid. Meski begitu BPOM perlu segera mengecek hasil temuan dari ujian klinis fase 1 Vaksin Nusantara,” pinta politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Melki menerangkan, seluruh lapisan masyarakat patut bersyukur vaksin Covid-19 ini dibuat secara personal dari hasil anak bangsa. Melki memastikan Komisi IX DPR RI akan mengawal pengembangan Vaknus tersebut. Apabila data dari tim peneliti setelah dicek lebih lanjut oleh BPOM memenuhi ketentuan pembuatan vaksin yang aman dan berkhasiat, maka Bangsa Indonesia bisa merayakan dengan suka cita temuan ini.

“Pembuatan Vaksin Nusantara diharapkan bisa dikerjakan secepat mungkin. Dan kami meminta BPOM tidak hanya menunggu laporan dari setiap tahapan uji klinis, tetapi terlibat dan memastikan pembuatan Vaksin Nusantara dapat memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku guna menjaga keamanan dan reputasi dari vaksin,” tutup legislator dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu. ■ *afr/sf*

Elva Hartati Apresiasi Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Aceh

Anggota Komisi IX DPR RI Elva Hartati mengapresiasi gerakan penanganan dan pencegahan Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dari berbagai tingkatan. Elva menilai, gerakan ini sangat efektif dalam menekan lonjakan kasus Covid-19.

“Kami mengapresiasi Pemda Aceh yang terbukti mampu menekan angka Covid-19. Dari paparan Sekda Aceh tadi, sejak awal muncul Covid-19, Pemda Aceh sudah membentuk berbagai program atau gerakan yang melibatkan elemen pemerintahan mulai tingkat atas atau daerah hingga bawah seperti kecamatan dan kelurahan,” ujar Elva usai pertemuan dengan Sekretaris Daerah Aceh di ruang rapat Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (15/2).

Dilanjutkannya, program yang dimaksud salah satunya adalah gerakan memakai masker atau GEMA (Gebrak Masker Aceh). Melalui GEMA, Pemda Aceh mengedukasi para pejabat daerah, ASN dan masyarakat mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk selalu melakukan penerapan protokol kesehatan dari menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Politisi dapil Bengkulu ini menyampaikan bahwa Pemda Aceh juga melibatkan ibu-ibu rumah tangga melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengedukasi keluarganya agar tetap melakukan protokol kesehatan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh Taqwallah menjelaskan,

untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Aceh, sebelum virus tersebut menyebar ke Aceh, Pemda Aceh telah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu dengan membatasi aktivitas masyarakat lewat pemberlakuan jam malam selama satu minggu. “Sayangnya kebijakan ini mendapat penolakan dari masyarakat,” kata Taqwa.

Pemda Aceh juga membentuk Gerakan Nakes Cegah Covid-19 atau Gencar pada Oktober 2020 dengan melibatkan 38.984 orang nakes dan puskesmas yang tersebar di seluruh Aceh. Tujuannya tak lain

untuk mengawal dan memantau warga yang melakukan isolasi, melacak dan menemukan warga yang bergejala dan kontak erat dengan pasien Covid-19.

Taqwa memaparkan, sejak September 2020, jumlah penduduk Aceh yang meninggal karena Covid-19 sudah menurun. Tercatat dari bulan September ada 176 orang yang meninggal, Oktober turun menjadi 96 orang, November 47 orang, Desember 31 orang, Januari Tahun 2021 sebanyak 27 orang. Kemudian per 14 Februari 2021 terdapat 3 orang yang meninggal dunia karena Covid-19. ■ ayu/es

”

KAMI MENGAPRESIASI PEMDA ACEH YANG TERBUKTI MAMPU MENEKAN ANGKA COVID-19.

Anggota Komisi IX DPR RI
Elva Hartati.
Foto: Ayu/Man





Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi di sela-sela mengikuti kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Batam, Kepri, Senin (15/2/2021). Foto : Jaka/Man

Kecepatan Hasil *Test Swab* PCR di Kepri Perlu Ditingkatkan

Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fauzi menilai, penanganan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terutama untuk kecepatan hasil test Swab *Polymerase Chain Reaction* (PCR) perlu ditingkatkan. Saat ini di Kepri, hasil *PCR Swab* baru bisa diketahui 3 sampai 5 hari, tentu ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan penanganan Covid-19.

“Hal tersebut tentu akan kami dorong untuk peningkatan fasilitas sarprasnya, sehingga hasilnya bisa lebih cepat. Dengan begitu APBD juga tidak terbebani, karena selama menunggu hasil perlu diisolasi 3 sampai 5 hari atau mungkin kalau OTG (orang tanpa gejala) mereka sudah beraktifitas seperti biasa sebelum hasil keluar, padahal mereka positif,” kata Intan di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja

”

SANGAT DIMUNGKINKAN BAGI KEPRI UNTUK DITINGKATKAN FASILITAS SARPRAS TEST DAN TRACING ALAT UNTUK SWAB PCR

Reses Komisi IX DPR RI ke Batam, Kepri, Senin (15/2).

Intan menuturkan, sebagaimana di daerah lain, sangat dimungkinkan bagi Kepri untuk ditingkatkan fasilitas sarpras test dan *tracing* alat untuk *Swab PCR*. Bukan hanya *reagen kit*-nya, tapi juga alat ekstraksi mesin dan juga laboratorium yang mendapatkan sertifikasi harus tersedia di Kepri.

Di sisi lain, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini berharap, masyarakat dengan kesadaran penuh dapat mengikuti program vaksinasi nasional. Karena vaksin ini aman dan tingkat efikasinya juga baik, apalagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) juga sudah mengeluarkan *Emergency Use Authorization* (EUA).

“Tapi mungkin kita juga mendengar bahwa ada sanksi administratif, sebagaimana yang tertuang di dalam Perpres. Karena dari hasil riset masih banyak masyarakat Indonesia sekitar 40 persen belum mau divaksin, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melakukan sosialisasi, edukasi dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, sehingga mereka ikut program vaksinasi,” tutup politisi dapil Jawa Barat VI ini. ■ jk/es

SKB 3 Menteri, Komisi X Ingatkan Pemerintah Tak Reaktif

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap reaktif dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang mengatur seragam sekolah karena berpotensi memicu konflik antara pusat-daerah. Menurutnya, SKB berpotensi merusak pembagian kewenangan pusat dan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian ditegaskan Fikri usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Sumbar, Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan dan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, di Pendopo Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (15/2).

“Sektor pendidikan adalah salah satu kewenangan pemerintah yang sudah didesentralisasikan secara konkuren. Yakni, urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perguruan tinggi menjadi kewenangan pemerintah pusat, SMA/K dan pendidikan khusus kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan tingkat SMP hingga ke bawah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mengungkapkan, jika terjadi permasalahan maka pemerintah pusat wajib mempercayakan kepada pemerintah daerah untuk terlebih dahulu menyelesaikan problem itu di daerah



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih bertukar cenderamata dengan Pemprov Sumbar. Foto: Puntho/Man

sesuai kewenangan masing-masing. Maka, tandasnya, tidak perlu secara langsung diambil alih pemerintah pusat dengan SKB yang berlaku secara nasional.

“Sehingga, dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut justru menimbulkan ketakutan di daerah. Seperti di Padang, Provinsi Sumbar ini, Dinas Kebudayaan terpisah dengan Dinas Pendidikan. Dinas Kebudayaan memberikan aspirasi agar Padang dan Provinsi Sumbar jangan disamakan dengan tempat lain. Di sini, masyarakatnya sangat agamis,” tandas Fikri.

Legislator dapil Jawa Tengah IX itu menambahkan, jikalau kemudian ada *statement* atau kebijakan seperti

SKB 3 Menteri yang dianggap kurang bijak oleh para ulama di Sumbar, hal tersebut dapat menimbulkan kerawanan hubungan antara pusat dan daerah. Sehingga, Komisi X DPR RI dalam waktu dekat akan segera mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebelumnya, SKB 3 Menteri yang terbit dengan Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 itu mengatur tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. ■ pun/sf

Komisi X Apresiasi Pengembangan Desa Wisata Denai Lama



Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI mengunjungi Desa Wisata Denai Lama di Deli Serdang, Sumut. Foto: Ria/Man

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam pengembangan desa wisata di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kami sangat kagum dengan destinasi wisata di Kabupaten Deli Serdang, salah satunya di Desa Denai Lama ini. Begitu masuk lokasi, rasa lelah langsung hilang karena terkesima dengan penataan yang bagus,” katanya saat mengikuti kunjungan lapangan Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI ke Deli Serdang, Sumut, Selasa (16/2).

Sofyan mengatakan, keberadaan destinasi wisata di Deli Serdang merupakan program nyata dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus membentuk anak-anak agar memiliki visi ke depan yang lebih baik.

Untuk membentuk visi anak-anak lanjut Politisi PDI-Perjuangan itu, pemerintah daerah perlu memberikan pendidikan dengan lingkungan dan suasana yang baik. “Pendidikan yang baik bisa tercipta apabila ekonomi masyarakat meningkat. Desa Wisata ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kepedulian masyarakat terhadap pendidikan akan meningkat,” katanya.

Sofyan dalam kesempatan itu pun berjanji akan membantu anak-anak Desa Denai Lama mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi. “Saya berjanji bersama Anggota Komisi X siap membantu dengan program anak pintar agar anak-anak di Desa Denai Lama bisa bersekolah hingga perguruan tinggi,” komitmen Sofyan.

Diketahui, Desa Wisata Denai Lama selama ini telah menghasilkan sebesar Rp140 juta setiap bulannya.

Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta agar pemerintah terus membantu pengembangan desa-desa wisata yang saat ini belum mendapatkan perhatian, karena desa wisata terbukti mampu menggerakkan perekonomian daerah.

“Putaran ekonomi sangat baik, ini satu bentuk peningkatan pendapatan di desa agar penduduk desa tidak migrasi ke kota. Kami (Komisi X) akan memberikan dukungan pelatihan, beasiswa, hingga pemenuhan buku di perpustakaan,” kata Sofyan yang merupakan legislator dapil Sumut I itu.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan menjelaskan, Deli Serdang memiliki banyak destinasi wisata. “Dan pengembangan Desa Denai Lama menjadi salah satu usaha Pemkab Deli Serdang untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat setempat,” katanya sembari mengatakan kehadiran Komisi X DPR RI ini merupakan penyemangat baru bagi pengembangan destinasi wisata di Deli Serdang, khususnya Denai Lama.

Sementara itu Pimpinan Sanggar Lingkaran sekaligus Ketua BUMDes Irwanto menjelaskan, Sanggar Lama merepresentasikan program pendidikan, literasi perpustakaan dan seni budaya. “Sanggar ini berguna agar anak-anak Desa Denai Lama bisa mengenal budaya sendiri dan menjadi bagian dari orang-orang yang mau mengembangkan budaya tersebut,” katanya seraya mengatakan Sanggar Lama menjadi sinergitas pengembangan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi anak-anak remaja. ■ rnm/sf

Pramuka Harus Cepat Beradaptasi di Era Digitalisasi

Anggota Komisi X DPR RI Dwita Ria Gunadi meyarankan, hendaknya Gerakan Pramuka segera bisa beradaptasi dengan perkembangan di era digital. Jika tidak bisa menjawab tantangan era digital ini, gerakan yang memiliki kepanjangan kata Praja Muda Karana yang artinya jiwa muda yang suka berkarya, akan kehilangan semangatnya. Pramuka harus segera regenerasi sehingga tidak semakin ditinggalkan jiwa muda.

“Jadi Pramuka tidak hanya dilatih baris-berbaris, sekarang apalagi era revolusi 4.0 sedang menuju 5.0, mereka harus beradaptasi dengan cepat. Jadi kami harapkan Pramuka itu mempunyai sumber daya

kualitas yang lebih baik dari pada sebelumnya. Menjawab tuntutan tantangan modernisasi, harus bergerak cepat dan secara dinamis, fleksibel, dan itu harus diantisipasi oleh kepala daerah,” papar Dwita saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Sumatera Selatan, di Palembang, Senin (15/2).

Di era digital dan teknologi informasi, Pramuka harus selalu maju, mengikuti perkembangan zaman, tanpa meninggalkan ruh dan tujuannya. Sebab, tidak bisa menutup mata, gerakan Pramuka lambat laun terus ditinggalkan. Anak-anak sekolah semakin malas pergi keluar dan mencari petualangan di luar rumah. *Smartphone* (telepon pintar) membuat mereka yang seharusnya

bermain di luar, lebih merasa nyaman terkurung di rumah.

“Pramuka bisa berkolaborasi dengan *stakeholder* yang lain di daerah dengan memanfaatkan digital Pramuka, jadi misalkan mereka sedang kemah, mereka tidak hanya sekedar kemah, tapi mereka memperkenalkan tempat wilayah kemah itu menggunakan teknologi digital,” saran politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Keterampilan mencari jejak, membangun tenda, bertahan hidup di alam atau *survival*, membuat sandi dan simpul yang dulu dianggap keren, kini sudah dianggap ketinggalan zaman. Tanpa adanya jiwa muda yang berperan, maka gerakan Pramuka yang seharusnya semakin hebat di umurnya yang ke-58 tahun, akan semakin tenggelam.

Hal itu tidak bisa dibiarkan, sebab kehadiran gerakan Pramuka bagi kalangan muda masih diperlukan sebagai wadah pendidikan karakter calon pemimpin bangsa ke depan. “Pramuka harus dikenalkan dengan perkembangan teknologi digital yang sedang berkembang dengan cepat,” ujar Dwita. ■ eko/es



Foto bersama Tim Kunker Reses Komisi X DPR RI usai menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Foto: Eko/Man

Percepat Proses Pemulihan Ekonomi Daerah Untuk Pacu Kinerja Perekonomian Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat berkontraksi menjadi minus 2,44 persen (*year of year*) sepanjang tahun 2020. Sektor industri pengolahan yang menjadi kontributor utama perekonomian Jawa Barat pun turut berkontraksi menjadi minus 4,22 persen (*year of year*) pada tahun lalu. Oleh karena itu, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah guna mendongkrak kinerja perekonomian nasional.

“Pertumbuhan ekonomi nasional pasti dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Jawa Barat. Peran strategis ini pun tak lepas dari daerah-daerah yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut, termasuk daerah pemilihan (dapil) saya di Kabupaten Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Dimana, daerah-daerah ini menjadi kawasan investasi dan pusat aglomerasi industri terbesar di Indonesia,” ungkap Puteri dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jabar, Senin (15/2).

Puteri menilai pandemi telah melemahkan permintaan produk industri baik di pasar domestik maupun ekspor yang sekaligus berimbas pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah. “Imbas pandemi ini turut berdampak pada penambahan jumlah pengangguran. Oleh karenanya, saya meminta baik



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bertukar cenderamata dengan mitra kerja di Bandung). Foto: Taufan/Man

pemerintah maupun Pemprov Jabar untuk memastikan desain bantuan sosial maupun stimulus usaha yang dapat menjangkau pekerja terdampak pandemi, khususnya di daerah yang menjadi pusat industri,” urai Puteri.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan sendiri telah memutuskan untuk memperpanjang sejumlah stimulus perpajakan seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran PPh pasal 25. Puteri pun mendorong agar stimulus ini dapat terlaksana secara optimal untuk mempercepat pemulihan sektor riil.

“Khususnya bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) maupun perusahaan-perusahaan di kawasan berikat. Insentif tersebut diharapkan dapat mengurangi beban keuangan,

sekaligus juga dapat berperan untuk menjaga kemampuan produksi,” ungkap Puteri.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta agar penyaluran kredit dan pembiayaan diarahkan bagi sektor-sektor unggulan di setiap daerah yang masih memiliki kemampuan bertahan di tengah pandemi.

“Misalnya saja, sektor pertanian di Jawa Barat yang masih bisa tumbuh positif, sehingga pembiayaan dapat didorong ke sektor tersebut beserta sub-sektor turunannya. Terlebih, Kabupaten Karawang sendiri juga menjadi lumbung padi nasional. Saya kira pemetaan sektor prioritas ini juga perlu dilakukan di tingkat wilayah, seperti Jawa Barat, dengan melibatkan peran kantor wilayah baik BI maupun OJK,” tutur Puteri.

■ tn/sf

Anggota DPR Dorong Masyarakat Tingkatkan Daya Beli

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan salah satu tantangan program pemulihan ekonomi nasional adalah bagaimana meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat saat pandemi Covid-19 masih belum mereda. Saat ini, pemerintah masih fokus melanjutkan program PEN yang telah berlangsung sejak tahun 2020 di antaranya pemberian bansos, bantuan UMKM, hingga melakukan kebijakan fiskal di bidang perpajakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Andreas di sela-sela pertemuan tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK wilayah Jawa Timur di Surabaya, Senin (15/2).

“Pemerintah masih akan melanjutkan program-program di antaranya yaitu pemberian bantuan sosial melalui pemberian uang tunai kemudian juga dengan melakukan kebijakan fiskal dalam bentuk fasilitas perpajakan bagi mereka yang mempunyai penghasilan tertentu. Lalu memberikan bantuan kepada UMKM itu dilanjutkan. Jadi intinya adalah melalui bantuan sosial, termasuk program keluarga harapan itu diharapkan dapat mempertahankan daya beli yang ada,” kata Andreas.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah selain memberikan bantuan untuk kelompok menengah bawah adalah menggerakkan kelompok menengah atas untuk mau membelanjakan uangnya guna mendorong pertumbuhan

ekonomi. Kondisi pandemi yang belum jelas, mengakibatkan kelompok menengah atas memilih menahan dan menyimpan uangnya yang terlihat dari peningkatan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan.

“Di satu sisi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menggerakkan kelompok menengah atas yang sebenarnya memiliki uang terlihat dari pertumbuhan DPK, mau membelanjakan uangnya. Nah di sinilah masalah mengenai keyakinan mereka terhadap keamanan dari pandemi ini. Karena itu memang yang menjadi penting adalah bagaimana program

pemulihan kesehatan itu dapat segera terwujud,” ujar Andreas.

Legislator dapil Jawa Timur V ini berharap penanganan program vaksinasi dapat menjadi kunci untuk mengubah kondisi sehingga kelompok menengah atas tidak ragu ataupun khawatir untuk membelanjakan uangnya. Selain itu, ia juga berharap seluruh bantuan yang sifatnya untuk mendukung daya beli masyarakat dapat dilanjutkan sampai adanya pemulihan di sektor kesehatan, agar perekonomian terutama sektor riil dapat berjalan.

“Ini juga sangat penting karena sebetulnya kemampuan atau daya beli itu ada di masyarakat. Namun karena sekarang ini ada kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19 ini, mereka masih *wait and see*, belum mau berbelanja. Kemudian, untuk yang ekonomi menengah ke atas diharapkan dengan secepatnya memulihkan kondisi kesehatan terutama masalah penanganan protokol kesehatan dan adanya vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” tutup Andreas. ■ nap/es



Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK wilayah Jawa Timur di Surabaya. Foto: Tasya/Man

Tiga Persoalan PEN Sumsel Perlu Perhatian Pemerintah

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menjabarkan sejumlah permasalahan yang menurutnya menjadi kendala implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Sumatra Selatan. Politisi Fraksi Partai NasDem itu menyatakan ada

tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, seperti persoalan *database*, besarnya bunga hingga persoalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang menjadi salah satu ujung tombak untuk memulihkan perekonomian Sumsel.

“Nah kendala yang dihadapi Himbara ataupun OJK adalah *database* daripada

UMKM dan KUR penerima, yang kedua adalah besarnya bunga yang diberikan oleh pemerintah kepada penerima KUR atau UMKM. Ketiga adalah (sektor usaha (UMKM),” kata Fauzi di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan dan *stakeholder* di Palembang, Sumsel, Senin (15/02). Kunker Komisi XI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hatari.

Menurut Fauzi, meski penyaluran program PEN sudah tepat sasaran, namun ada sejumlah hal yang perlu mendapat perbaikan. “Pertama, jenis usahanya harus dibenahi, kedua jangan sampai tumpang tindih antara KUR yang satu penerima dengan UMKM, artinya jangan sampai satu orang punya tiga usaha (menerima tiga bantuan), itu secara tidak langsung menyalahi aturan yang ada di Kementerian Keuangan,” jelas Fauzi lebih lanjut.

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan Sumsel dapat menjadi prioritas utama. Dengan hal itu, diharapkan ekonomi di Sumsel bisa kembali menggeliat ke arah yang lebih positif usai terdampak krisis akibat pandemi Covid-19. “Baik data, jenis usaha maupun bunga ini menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi di Sumatera Selatan,” tutup legislator dapil Sumsel I itu. ■

srw/sf



PERTAMA, JENIS USAHANYA HARUS DIBENAH, KEDUA JANGAN SAMPAI TUMPANG TINDIH ANTARA KUR YANG SATU PENERIMA DENGAN UMKM, ARTINYA JANGAN SAMPAI SATU ORANG PUNYA TIGA USAHA (MENERIMA TIGA BANTUAN), ITU SECARA TIDAK LANGSUNG MENYALAH ATURAN YANG ADA DI KEMENTERIAN KEUANGAN

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro.
Foto : Fitri/Man



Respon Berbagai Tantangan, DPR Dukung Penguatan Kerja Sama AIPA–Parlemen Norwegia



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Ist/Man

Pandemi Covid-19 yang melanda di seluruh dunia saat ini menjadi pengingat bahwa kerja sama internasional yang berlandaskan pada prinsip kolaborasi dan solidaritas sangat diperlukan. Dalam merespon berbagai tantangan global maupun regional, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan Parlemen Norwegia (*Storting*) mengadakan pertemuan bertajuk *AIPA-Norwegian Parliament Introductory Meeting*.

Pertemuan yang digelar secara daring pada Jumat (26/2) itu dihadiri oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, perwakilan masing-masing parlemen Anggota AIPA, dan perwakilan Parlemen Norwegia (*Storting*) yang dipimpin oleh H.E. Elin Adgestein selaku *Head of Asia Delegation*.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara

parlemen AIPA dengan Parlemen Norwegia (*Storting*) dalam merespon berbagai tantangan yang menjadi perhatian bersama kedua wilayah, yakni seputar pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan, demokrasi, peran parlemen dalam merespon pandemi Covid-19 dan imbasnya terhadap kehidupan masyarakat, dan upaya anti korupsi.

Parlemen Norwegia (*Storting*) yang baru saja mendapatkan status sebagai *Observer* pada organisasi AIPA berharap pertemuan yang baru pertama kali dilakukan ini, dapat mendorong kerja sama strategis yang berlandaskan prinsip *mutual understanding* antara AIPA dan Parlemen Norwegia (*Storting*), utamanya dalam topik kemaritiman, *green house gases*, dan

upaya penguatan kolaborasi dalam kerangka regional. Fadli menegaskan, Norwegia adalah salah satu *partner* utama bagi Indonesia.

“Kerja sama bilateral yang telah terbangun selama ini dalam berbagai sektor dan melibatkan berbagai *stakeholders* menegaskan komitmen kedua negara yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan, salah satunya melalui kerja sama mengurangi emisi gas rumah kaca. Saya berharap, melalui keterlibatan Norwegia pada *framework* kerja sama regional AIPA, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan global maupun regional bersama-sama,” harap Fadli Zon dalam sambutannya.

Selaras dengan visi ASEAN 2025, “Melangkah Maju Bersama (*Forging Ahead Together*)”, maka diharapkan kerja sama yang dibangun antara parlemen negara-negara ASEAN yang tergabung dalam AIPA dengan berbagai negara *observer* seperti Norwegia ini dapat memberi manfaat positif bagi seluruh pihak yang terlibat, utamanya dalam mencapai *SDGs* yang merupakan prioritas seluruh negara di berbagai belahan dunia saat ini.

Selain itu, selaku Presiden *Southeast Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC)*, Fadli Zon berharap AIPA dan Parlemen Norwegia (*Storting*) dapat melakukan lebih banyak dialog dan meningkatkan kerja sama strategis untuk mendukung keterbukaan dan transparansi sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. ■ **sf**

BURT Tinjau Pelayanan Jamkestama di Ciputra Hospital CitraRaya Tangerang



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso usai pertemuan dengan manajemen Ciputra Hospital CitraRaya. Foto: Agung/Man

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Ciputra Hospital CitraRaya, Tangerang. Kunjungan kali itu dalam rangka Pengawasan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI dan keluarganya pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020–2021.

Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan maksud dan tujuan kunjungan kerja BURT DPR RI adalah untuk memastikan Program Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya yang dilaksanakan oleh rumah sakit *provider* PT Asuransi Jasindo telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Program Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya telah diatur

dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2014 serta aturan pelaksanaannya Permenkes Nomor 55 Tahun 2014 dan Permenkeu Nomor 167/PMK/02/2014.

“Selain itu maksud dan tujuan kunjungan kerja kali ini juga untuk mengetahui kendala-kendala yang mungkin dihadapi oleh rumah sakit *provider* PT Asuransi Jasindo dalam memberikan pelayanan kepada peserta Program Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya,” terang Agung dalam pertemuan dengan manajemen Ciputra Hospital CitraRaya di Tangerang, Banten, Selasa (2/3).

Tim Kunjungan Kerja BURT menitikberatkan pada beberapa hal terhadap rumah sakit yang menjadi *provider* mulai dari ketentuan pelayanan yang dimulai dari kedatangan pasien sampai dengan kepulangan pasien.

Lalu, ketersediaan *system online* guna memberikan *database* dan rekam medis terbaru seluruh Anggota DPR RI beserta keluarganya.

Tak lupa pertimbangan ketersediaan dan jumlah ruang VVIP dan dokter spesialis, kelengkapan alat kesehatan dan laboratorium, serta kelancaran proses dan ketepatan waktu penagihan dari rumah sakit *provider* kepada Jasindo.

Menurut Agung, manajemen Ciputra Hospital CitraRaya telah menerangkan kelengkapan fasilitas dan layanannya. “Kunjungan kali ini kami mendapatkan informasi yang lengkap, ini artinya Jasindo juga bekerja dengan baik. Ke depan kami (BURT) dapat merekomendasikan bagi Anggota DPR yang dipilnya di Banten untuk dapat menggunakan fasilitas di rumah sakit ini,” tutupnya. ■ ah

Setjen DPR RI Dukung Penuh Program Vaksinasi Covid-19

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan pihaknya mendukung penuh program Vaksinasi Covid 19 dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di lingkungan DPR RI.

Dalam rangka mendukung program pemerintah tersebut, Indra mengatakan kesetjanaan memperoleh alokasi vaksin dari pemerintah. “Sampai sekarang atau hari keempat pelaksanaan vaksinasi, baru sekitar 3 ribu lebih yang mengikuti vaksinasi,” kata Indra kepada **Parlementaria**, Senin (1/3).

Indra menuturkan, vaksinasi ini adalah bagian dari jadwal yang telah diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merupakan bentuk proteksi bagi Anggota DPR yang rentan terpapar saat menjalankan tugas konstitusionalnya.

Selain Anggota DPR, lanjut Indra, pemberian vaksin juga menjangkau pegawai di lingkungan DPR. “Kami juga peruntukkan untuk perangkat lain seperti Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal), petugas *cleaning service*, tenaga ahli, *driver* dan ajudan, itu semua masuk dalam *list* kami,” terangnya.

Dirinya juga memastikan pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan disiplin protokol kesehatan, sehingga baik penerima vaksin maupun vaksinator tetap diliputi rasa aman.

Indra menambahkan, untuk tetap mendukung keterbukaan informasi publik, kesetjanaan lewat Biro Pemberitaan Parlemen telah menyediakan *platform* pengambilan foto dan gambar untuk pihak yang membutuhkan. “Sehingga proses vaksinasi tetap tertib dan yang terpenting kegiatan (vaksinasi) ini

benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan yang sesungguhnya,” imbuh Indra memastikan.

Diharapkan dengan adanya kegiatan vaksinasi ini, sistem kekebalan tubuh atau *herd immunity* segera terbentuk dan menekan laju penyebaran Covid-19.

“*Herd immunity* ini akan terbangun salah satunya dengan vaksinasi. Meski, masih harus dibuktikan dengan proses waktu tetapi paling tidak, sudah dilakukan riset dan di banyak negara pun, vaksinasi merupakan alternatif sekunder untuk mengurangi penyebaran virus,” pungkasnya.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 telah dimulai pada 13 Januari 2021 dengan vaksinasi pertama dilakukan pada Presiden RI Joko Widodo, serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang seperti tenaga kesehatan, pemuka agama, guru, dan lain-lain

Program vaksinasi Pemerintah terlaksana setelah pada tanggal 11 Januari 2021, Badan POM mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat (EUA) untuk vaksin dan

dikeluarkannya fatwa halal oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sebagai informasi, vaksin Covid-19 produksi Sinovac membutuhkan dua kali penyuntikan dengan jarak waktu 14 hari. Para penerima vaksin akan mendapatkan kartu vaksinasi dan diingatkan untuk kembali menerima vaksin untuk kedua kalinya.

Saat ini Indonesia telah memasuki program tahap II yang menjangkau lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun dan pekerja Publik termasuk PNS, TNI dan Polri. ■ ann/es



Sekretaris Jenderal DPR RI
Indra Iskandar. Foto: Runi/nvl

BK Setjen DPR Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Hukum UI

Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Edmon Makarim melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara BK Setjen DPR dengan FH UI. Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dikemas dalam *Focus Group Discussion* dengan tema ‘Politik Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi’ yang dilaksanakan di Auditorium FH UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (3/3).

Dalam sambutannya, Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul menyampaikan, kerja sama dengan UI ini adalah untuk mewujudkan *tagline* ‘*Bridging the research to the role and functions of parliament*’ sebagai landasan dari *evidence based of policy making*. Sehingga, menjadi jembatan antara proses keputusan politik pengambilan kebijakan di DPR RI dengan dunia akademik.

“Karena saya tahu begitu bedanya antara dunia akademik dengan dunia politik. Karena itu perlu kita jembatan. *Bridging* dalam arti suasana akademik atau karakteristik akademik untuk bisa mendekat, bahkan ekstremnya mempengaruhi atau membantu proses pengambilan kebijakan di DPR,” jelas Sensi.

Di sisi lain, Sensi menjelaskan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2020, BK DPR RI mengelola sekitar 400 profesional termasuk Tenaga Ahli Komisi. Meskipun demikian, BK DPR RI tetap menganggap kerja sama dengan perguruan tinggi sangat penting untuk menunjang pertukaran data dan informasi yang terus berkembang setiap hari.



Kepala Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI Inosentius Samsul (kanan) di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama antara BK DPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Foto: Ridwan/nvl

“Dalam dunia yang saling berbagi ini, kita saling menutupi kekurangan. Kami juga meskipun 400 orang tapi sesungguhnya masih banyak kekurangan. Jadi mau tidak mau memang Badan Keahlian sebagai tulang punggung keahlian ini terus bermitra dengan perguruan tinggi. Ke depan saya pikir dengan adanya Kampus Merdeka, saya pikir kita perlu terus mempertemukan proses kebijakan dengan aktivitas akademik,” jelas Sensi

Dalam kesempatan yang sama, Dekan FH UI Edmon Makarim berharap kerja sama ini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi FH UI maupun Badan Keahlian DPR, melainkan untuk masyarakat Indonesia secara umum, terutama dalam wilayah isu perlindungan data pribadi.

“Kami berharap dengan adanya diskusi ini dapat memberikan dampak baik bagi pengembangan hukum ke depannya, khususnya dalam hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Tentunya, FH UI senantiasa mendukung kegiatan ilmiah yang diselenggarakan dengan Lembaga negara maupun instansi pemerintahan untuk sebagai pengabdian untuk mendorong kebijakan dan legislasi yang berbasis akademik,” ujar Edmon.

Diketahui, setelah penandatanganan perjanjian kerja sama ini, akan dilanjutkan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Rektor Universitas Indonesia yang diharapkan berlangsung paling lambat awal April 2021. Saat ini, BK DPR RI pun telah memiliki MoU terhadap kurang lebih dengan 37 universitas. ■ rdn/es

Satker DPR Raih Penghargaan IKPA Terbaik

Satuan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan penghargaan sebagai Satuan Kerja Mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik I tahun 2020 pada pagu anggaran di atas Rp200 miliar. Penghargaan ini diberikan langsung oleh KPPN Jakarta VII kepada DPR RI, diwakili Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR RI Rudi Rochmansyah.

Menurut Rudi, penghargaan ini merupakan penghargaan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Pasalnya DPR RI merupakan lembaga politik yang memiliki anggaran yang besar dengan kegiatan yang sangat dinamis. “Nah, ini penghargaan yang sangat *prestigious* bagi kami karena DPR termasuk (lembaga dengan) kategori pagu anggaran yang sangat besar, di atas Rp200 miliar,” ujar Rudi saat ditemui *Parlementaria* di ruang kerjanya, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3).

Selama tiga tahun sejak terbit peraturan Menteri Keuangan Nomor 195 tahun 2018 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, pada tahun ini, DPR RI berhasil mendapatkan peringkat satu terbaik setelah sebelumnya selama empat kali berturut-turut penghargaan tersebut diberikan kepada Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut Rudi mengatakan, penghargaan IKPA ini menjadi salah satu faktor untuk mengukur seberapa baik kualitas anggaran dari masing-masing kementerian dan lembaga. Satker (satuan kerja) DPR RI sendiri berhasil mendapat nilai akhir 99,19 dari

keseluruhan indikator penilaian IKPA untuk pagu di atas Rp200 miliar.

Dengan capaian realisasi anggaran 93 persen untuk Satker DPR RI dan 97,4 persen untuk Satker Setjen DPR RI, angka ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah. “Baru tahun ini DPR untuk realisasi satker dewannya (mencapai) 93 persen, kemudian kalau Satker Setjen 97,4 persen, dan ini merupakan pencapaian yang tertinggi,” ungkap Rudi lebih lanjut.

Ke depannya, Rudi berharap tidak hanya Satker DPR RI saja yang mendapat penghargaan, tetapi juga Satker Setjen. Untuk itu, sebagai Pimpinan di Biro Perencanaan dan

Keuangan Setjen DPR RI, Rudi akan mengimbuu agar penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat diupayakan secara maksimal dengan standar IKPA.

“Standar IKPA secara nasional triwulan pertama itu 15 persen, kemudian triwulan kedua kumulatif ya 40 persen, triwulan ketiga 60 persen, triwulan keempat 90 persen. Itu harus menjadi standar dalam penyerapan (anggaran). Kalau itu sudah tercapai indikator pertama sudah terpenuhi, nah kemudian yang kedua, revisi-revisi anggaran itu diharapkan untuk triwulan itu hanya satu kali, jangan lebih dari satu kali,” tambahnya. ■ *bla,fit/sf*



Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen DPR RI Rudi Rochmansyah. Foto: GeraldI/mvl

Pimpinan BKSAP Ingin Jajaki Kerja Sama 'Sister City' dengan Kerajaan Maroko

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kerja sama dalam bidang pariwisata dengan Maroko, melalui konsep *Sister City*. Hal itu bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari dampak pandemi Covid-19.

Pada saat menerima kunjungan Duta Besar Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah, Putu Supadma mengatakan pertemuan tersebut membahas mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Maroko yang sudah terjalin selama 60 tahun. Putu Supadma berharap kerja sama antar kedua negara dapat kian meningkat, khususnya di bidang pariwisata dan perdagangan.

"Kita melihat kemungkinan membangun *Sister City* Bali dengan Marrakesh, karena melihat kedua negara ini mempunyai potensi pariwisata sangat besar," ujar Putu Supadma saat pertemuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2). Ia menuturkan saat ini sudah ada *Sister City* antara DKI Jakarta dengan Kota Casablanca (Maroko), Sumatera Barat dengan Fremantle, Australia Barat.

Karena itu, menurutnya tidak menutup kemungkinan dijajaki *Sister City* antara Bali dengan Marrakesh, sebagai salah satu tujuan wisata di Maroko. Menurutnya, ada beberapa sektor kerja sama yang bisa ditingkatkan melalui program *Sister City* ini, antara lain sektor pariwisata dan budaya, sektor perdagangan hingga pemberdayaan Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang pelayanan pariwisata (*hospitality industry*).

Terkhusus di bidang Pariwisata, lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat ini, Maroko menjadi negara tujuan dari 14 juta wisatawan mancanegara. Sementara, selama tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia mencapai 16 juta kunjungan.

Dengan potensi tersebut, Putu Supadma menilai Maroko bisa menjadi *hub* bagi Indonesia, demikian juga sebaliknya. "Ini adalah salah satu *win-win*, di mana Maroko bisa menjadi *hub* untuk wisatawan Eropa yang mau ke Indonesia, sementara Indonesia menjadi *hub* untuk wisatawan Asia yang ingin berangkat ke Eropa bisa melalui Maroko," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

Putu Supadma menambahkan, sebagai sesama tujuan wisata mancanegara, kedua negara dapat saling bertukar informasi dan melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan hingga peningkatan kapasitas SDM yang berkontribusi di bidang pariwisata. "Sehingga kita mendapatkan pemahaman dalam pengelolaan masing-masing target wisatawan. Mengingat market terbesar kita adalah Asia dan Australia, sedangkan *market* terbesar mereka adalah Eropa," ungkapnya.

Ia berharap, peningkatan kerja sama Indonesia-Maroko tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional, termasuk bagi pelaku UMKM untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dari dampak pandemi Covid-19. "Kita juga memiliki visi, jika jalur ini memberikan kontribusi, hubungan *direct flight* Marrakesh-Bali menjadi keniscayaan untuk menopang industri pariwisata kita," terang politisi dapil Bali itu.

Selain itu, kedua pihak saling berbagi pengalaman dan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19. Menurutnya, BKSAP berencana untuk berkunjung dan menemui Kementerian Kesehatan Maroko guna membahas lebih lanjut mengenai pengendalian pandemi.

"Bagaimana cara mereka untuk mendeteksi dini, dan saya nanti ingin menyampaikan bahwa kita memproduksi GeNose. GeNose ini juga bisa menjadi sebuah alat diplomasi kita ke depan dan bisa disuarakan disana," tutur Putu Supadma. ■ **ann/sf**



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana bertukar cenderamata dengan Dubes Maroko untuk Indonesia Ouadia Benabdellah. Foto: Runi/Man

DPR Terima Penghargaan Lingkungan Ramah Disabilitas

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mewakili DPR RI menerima piagam penghargaan dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Penghargaan ini diberikan kepada BURT DPR RI karena dinilai telah memberikan akses yang mudah dan nyaman kepada penyandang disabilitas di lingkungan Gedung DPR RI.

Menurut Agung, memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi kaum disabilitas sudah merupakan tugas BURT. Terlebih, hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

“Sebetulnya itu sudah tugas kami sebagai BURT untuk bisa memberikan fasilitas bagi kaum disabilitas, yang bayangan kami selama ini kayaknya sudah cukup, ternyata masih banyak yang belum. Tentunya dari hasil diskusi, kami akan siapkan seluruh fasilitas pendukung atau aksesibilitas untuk penyandang disabilitas,” jelas Agung usai pertemuan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (1/3).

Lebih lanjut Agung menjelaskan, meski lingkungan Gedung DPR RI dinilai sudah cukup ramah disabilitas, namun masih ada beberapa fasilitas yang perlu disiapkan untuk menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas. Seperti akses terhadap penyandang tunanetra dan penyandang tunarungu yang masih belum tersedia.

“Belum semuanya (ada fasilitas untuk disabilitas), tetapi sebagian besar sudah. Akses ke masjid, ke ruang Paripurna semua sudah ada untuk beliau-beliau (penyandang disabilitas, **red**) yang mengalami gangguan, sehingga mudah mengakses. Saya ingin memastikan



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso menerima piagam penghargaan dari PPDI. Foto : Mentari/Man

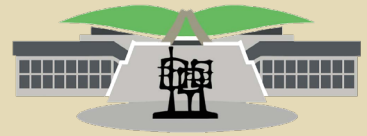
bahwa semuanya harus ada fasilitas untuk itu. Bertahap kita akan penuhi, kami berusaha nanti untuk bisa menyiapkan semua itu,” tambah politisi dapil Jawa Barat I itu.

Ke depannya, Anggota Komisi III DPR ini berharap Kompleks Parlemen dapat menjadi *role model* bagi gedung-gedung lain di seluruh Indonesia terhadap aksesibilitas yang ramah kaum disabilitas. “Ke depan, Gedung DPR dan Kompleks Parlemen ini menjadi *role model* bagi gedung-gedung di seluruh Indonesia, terhadap aksesibilitas terhadap kaum disabilitas,” harap Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar juga berharap ke depannya DPR RI dapat memberikan akses data yang mudah kepada publik,

termasuk penyandang disabilitas, agar penyandang disabilitas dapat lebih mudah dan nyaman dalam mengakses informasi publik serta dalam melakukan *concern-concern* terhadap situasi politik.

“Bagaimana nanti akses data kita sebagai parlemen modern mudah diakses oleh publik, di dalamnya ada disabilitas juga. Agar disabilitas juga bisa melihat bagaimana DPR melakukan *concern-concern* politik terhadap UU misalnya,” kata Indra. Turut hadir mendampingi Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam pertemuan ini Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Satyanto Priambodo dan Kepala Bagian Gedung dan Instalasi Waluyo. ■ **bia/sf**



Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri istighotsah bersama sejumlah pengasuh Pondok Pesantren dan Kiai Khos se-Provinsi Banten di Pondok Pesantren At-Thohiriah, Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (26/2). Foto: Jaka/Man



Anggota DPR RI Evita Nursanty (tengah) resmi dilantik menjadi Ketua Umum KBPP periode 2021-2026 dalam Musyawarah Nasional V Keluarga Besar Putera-Puteri Polri (KBPP Polri) di Jakarta, Selasa (2/3). Foto: Runi/Man



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta pejabat di lingkungan Setjen DPR RI saat acara pelepasan PNS yang memasuki masa pensiun di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta (26/2). Foto: Mentari/Man

